

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi yang didirikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan misi dan peran miliknya. Saat menghadapi tantangan kompetensi global dunia usaha yang semakin ketat, misi BUMN sebagai sumber penerimaan negara, stabilisator, dan motivator pembangunan dituntut untuk memainkan peranan yang besar dalam pembangunan nasional. BUMN sebagai agen pembangunan memiliki tanggung jawab untuk selalu memperhatikan interaksinya dengan aspek-aspek kehidupan nasional melalui investasi yang sesuai dengan misi yang diembannya. Untuk menjalankan misi dan perannya BUMN harus peka terhadap setiap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan dunia usaha. Sehingga profesionalisme BUMN di segala bidang terus menerus meningkat, baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan maupun dalam bidang pengendalian dan pengawasan.

Perkembangan dunia bisnis dan ekonomi sudah berkembang semakin pesat tidak terkecuali pada BUMN. Para pelaku bisnispun di hadapkan pada berbagai macam tantangan yang semakin beragam, mulai dari semakin maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta berbagai kecurangan yang dapat membahayakan harta perusahaan, munculnya perusahaan-perusahaan pesaing dan

juga perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri (asing). Berdasarkan kondisi tersebut, perlu kiranya setiap perusahaan khususnya BUMN berusaha meningkatkan kesadaran untuk menerapkan *Good Corporate Governance* guna meminimalisir tantangan-tantangan bisnis tersebut.

Good Corporate Governance dapat menjadi salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka serta untuk menjauhkan perusahaan dari tantangan-tantangan yang kerap muncul pada saat ini. Dengan demikian, sejalan dengan pemikiran ini, BUMN juga semestinya mampu mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance*. Akan tetapi, dalam kenyataannya BUMN dalam melakukan kegiatan usahanya kurang begitu memperhatikan implementasi prinsip *Good Corporate Governance*.

Good corporate governance akhirnya menjadi isu penting, terutama di Indonesia yang merasakan paling parah akibat krisis dan masih berlanjut sampai saat ini. Disamping itu, banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan emiten di pasar modal yang ditangani Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) menunjukan rendahnya mutu praktik *Good Corporate Governance* di Negara kita.

Fenomena terkait dengan BUMN yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara Strategis (BUMNIs), Kementerian BUMN mencatat setidaknya ada enam Badan Usaha Milik Negara Strategis yang kondisinya dinilai memprihatinkan. Yakni, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT PINDAD, PT Dahana, PT LEN dan PT INTI,

PT Krakatau Steel. (Gatot Trihargo, Deputi urusan informasi kementerian BUMN, 2012). Salah satu penyebab belum optimalnya kinerja keuangan BUMN adalah karena penggunaan modal yang tidak efisien serta kurangnya perhatian terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (Tjager dkk, 2003; Sukardi, 2005; FCGI (Forum For Corporate Governance In Indonesia, 2002)).

Terdapat fenomena yang terjadi di perusahaan Indonesia sekarang ini yaitu masih banyaknya perusahaan yang menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dikarenakan dorongan regulasi dan menghindari sanksi dibandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan (Ignatius Heruwasto, Universitas Indonesia, 2008). Hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perusahaan. Baik buruknya *Good Corporate Governance* BUMN di Indonesia memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengendalian intern pada BUMN tersebut. Dimana masih banyaknya perusahaan di Indonesia yang menerapkan *Good Corporate Government* dikarenakan regulasi dan menghindari sanksi dibandingkan sebagai kultur dari perusahaan tersebut.

Audit internal merupakan bagian dari *Good Corporate Governance*, dimana didalamnya mencakup pengawasan yang memadai, etika bisnis, independensi, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan perusahaan, serta mekanisme untuk memastikan adanya tindak lanjut yang seksama jika terjadi pelanggaran dalam perusahaan.

Menurut Tjager dkk. (2003) dalam Sela (2012) mengemukakan bahwa salah satu unsur pelaksanaan *Good Corporate Governace* adalah audit internal. Peran audit internal pada perusahaan swasta maupun BUMN sangatlah diperlukan guna membantu pihak manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberikan mereka analisis, penialaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa. Dalam hal ini, manajemen perlu mendelegasikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepada pihak lain yaitu audit internal yang berada pada divisi Satuan Pengawasan Intern.

Audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, dipersiapkan dalam organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi. Kegiatan ini mengaudit dan menilai efektivitas kegiatan unit yang lain. Sawyer (2005:9) mengemukakan bahwa:

“Internal Auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate it’s activities as a service to the organization.”

Pengertian service to organization Sawyer (2005:9):

“Internal auditing is as systematic, objective appraisal by internal auditors of the diverse operations and controls within an organization to determine whether (1) financial and operating information is accurate and reliable, (2) risks to the enterprise are identified and minimized, (3) external regulations and acceptable internal policies and producers are followed, (4) satisfactory operating criteria are met, (5) resources are used efficiently and economically, and (6) the organization objectives are effectively achieved-all for the purpose of assisting member of the organization in the effective discharge of the responsibilities.”

Definisi di atas, dapat diartikan sebagai berikut:

Audit internal merupakan aktivitas konsultan yang independen dengan keyakinan objective yang dibentuk untuk memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kinerja aktivitas organisasi. Keberadaan audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam rangka menilai dan meningkatkan efektivitas risiko manajemen, pengendalian dan peraturan pemerintah. Kerangka kerja praktis yang profesional merupakan alat penunjang keberhasilan seorang internal auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Selain Audit Internal yang menjadikan unsur penerapan *Good Corporate Governance* adalah Pengendalian Internal. BPKP mendefinisikan *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*). Arens,dkk (2008) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya. Kebijakan perusahaan inilah yang disebut dengan pengendalian dan secara kolektif disebut dengan pengendalian internal.

Sedangkan menurut Mayangsari & Wandanarum (2013) pengendalian internal adalah penggunaan semua sumberdaya perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai.

Untuk itu, demi tercapainya tujuan perusahaan tersebut, maka prosedur dan kebijakan harus dilakukan oleh perusahaan dengan cara setiap aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan harus melalui sebuah sistem yang didesain untuk dapat mengarahkan, dan mengendalikan dan mengawasi rangkaian aktivitas sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara efisien dan efektif.

Arens (2010:273) mengemukakan bahwa:

“internal control includes five categories of control that management design and implements to provide reasonable assurance that management’s control objectives will be met. These are the main components of internal control and are:

- 1. control environment*
- 2. risk assessment*
- 3. control activities*
- 4. information and communications*
- 5. monitoring*

Terdapat hubungan langsung antara tujuan, yang merupakan hal yang diperjuangkan untuk dicapai perusahaan dan komponen-komponen tersebut yang mencerminkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Control environment (lingkungan pengendalian), menunjukkan atmosfer atau suasana (*sets the tone*) dalam suatu organisasi/ perusahaan yang mempengaruhi kesadaran pengendalian (*control consciousness*) dari orang-orang dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian ini merupakan pondasi bagi komponen lainnya dan sangat dipengaruhi oleh suasana yang diciptakan dari atas atau *tone at the top*.

Risk assessment (penilaian risiko), merupakan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola berbagai risiko dalam organisasi dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Control activities (aktivitas pengendalian), mencakup kebijakan dan prosedur untuk membantu meyakinkan bahwa semua tindakan dilaksanakan sesuai dengan arahan manajemen secara efektif.

Information and communication (informasi dan komunikasi), sistem informasi dan komunikasi memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk memperoleh dan berbagi informasi yang diperlukan untuk mengelola, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional.

Monitoring (pemantauan), merupakan proses penilaian terhadap kualitas dan efektivitas dari sistem pengendalian internal, termasuk modifikasi dan penyempurnaannya apabila diperlukan.

Kelima komponen pengendalian internal tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dalam rangka pencapaian tujuan, *effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial end compliance with laws and regulations*.

Fenomena selanjutnya yaitu PT. Telkom Indonesia, Tbk mengalami pencurian kabel tembaga 485 meter yang terjadi di jalan pahlawan dan surapati bandung yang merugikan perusahaan senilai 400 juta rupiah (www.nasional.tempo.com, januari 2015). Sebelumnya PT. Telkom Indonesia, Tbk juga telah pernah mengalami hal serupa yaitu pencurian kabel di Telkom Malang.

Seperti yang dipaparkan oleh Deputy General Manager Kandatel Telkom Malang, Gunawan Rismayadi, “jumlah kasus pencurian kabel telepon tercatat sebanyak 45 kali. Lokasi pencurian sebagian besar berada di wilayah Malang Selatan yang merupakan kawasan pegunungan. Akibat dari peristiwa ini Kantor Daerah Telkom (Kandatel) Malang merugi hampir Rp 1 miliar akibat pencurian kabel telepon yang terjadi dalam kurun waktu Januari-Juli 2007. Kalkulasi nilai kerugian tersebut dihitung dari hilangnya biaya sambungan percakapan dan penggantian kabel.

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) yang mana tanggal 25 biasanya gaji dibayarkan namun pembayaran gaji kepada karyawan mengalami keterlambatan sejak awal Januari 2015 sehingga sampai pada akhir bulan Juni 2015 para karyawan belum menerima hak nya padahal mereka telah melakukan kewajiban mereka sebagai karyawan di PT INTI. Hal itu menyebabkan sekitar 500 karyawan perusahaan tersebut menggelar aksi demonstrasi yang berisi pemenuhan hak dasar berupa gaji, pembayaran THR, uang pensiun, dan cuti guna mengingatkan dewan direksi atas keterlambatan penggajian yang terjadi di PT INTI. di pelataran Gedung PT INTI, Kota Bandung, aksi demonstrasi karyawan dari berbagai divisi ini dimotori oleh beberapa karyawan yang merangkap aktivis Serikat Pekerja. (www.koran-sindo.com, 03 Juli 2015). Hal ini mencerminkan bahwa sistem pengendalian internal pada perusahaan PT INTI masih kurang memadai, karena masih terdapat permasalahan dalam hal pengendalian internal khususnya pengendalian internal pada penggajian.

Menurut Tuanakotta (2013) pengendalian internal akan berjalan efektif manakalah komponen inti pengendalian internal diterapkan secara baik dan benar dalam organisasi guna memberikan kepastian terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengendalian internal harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan kebijakan organisasi melalui sebuah sistem yang telah didesain sedemikian rupa serta perlu diawasi dengan baik dan benar. Hal ini perlu dilakukan, karena dapat mengurangi tingkat kecurangan diantaranya penyalahgunaan wewenang dan melakukan penyajian laporan keuangan yang salah. Ini juga berarti pengendalian internal secara efektif dapat memberikan kontribusi positif terhadap pencegahan adanya kecurangan.

Dengan demikian, untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan atau organisasi apapun harus mampu merancang pengendalian internal yang baik, sehingga dapat menekankan aspek pengendalian atas reabilitas pelaporan keuangan guna memenuhi tanggung jawab suatu laporan keuangan, serta efisiensi dan efektifitas operasional dalam pemakaian sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan informasi keuangan dan non keuangan dalam rangka pengambilan keputusan, dan ketaatan pada hukum dan peraturan.

Membangun pengendalian internal yang kuat merupakan kewajiban bagi setiap organisasi yang ingin menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*). Seperti halnya audit internal, Mardiasmo juga menguatkan bahwa *good governance* dapat di wujudkan melalui salah satunya pengendalian. Pengendalian (*control*) dijelaskan Mardiasmo sebagai mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif

(pemerintah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi tercapai.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tita Nurmala 2012, yang berjudul “Pengaruh Audit Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Pos Indonesia”

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Audit Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*. Jadi hipotesis yang dikemukakan dari hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan pada pengaruh Audit Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*. Adapun perbedaan Antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penggunaan variabel yang berbeda. Pada penelitian terdahulu oleh Tita Nurmala. Variabel bebas (*Independent variabel*) yang digunakan adalah Pengaruh Audit Internal, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan Audit Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Internal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “**Pengaruh Audit Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance***”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Audit Internal masih lemah
- b. Pengendalian Internal kurang optimal
- c. *Good corporate governance* masih lemah

1.2.2 Rumusan Masalah

Agar masalah yang diteliti memperoleh kejelasan dan penelitian lebih terarah, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Audit Internal pada PT Inti (Persero) Bandung.
2. Bagaimana Pengendalian Internal pada PT Inti (Persero) Bandung.
3. Bagaimana Penerapan *Good Corporate Governace* pada PT Inti (Persero) Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh Audit Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governace* pada PT Inti (Persero) Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Pengendalian Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governace* pada PT Inti (Persero) Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governace* pada PT Inti (Persero) Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tidak terlepas dari permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Audit Internal pada PT Inti (Persero) Bandung.
2. Untuk mengetahui Pengendalian Internal pada PT Inti (Persero) Bandung.
3. Untuk mengetahui Penerapan *Good Corporate Governace* pada PT Inti (Persero) Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh Audit Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governace* pada PT Inti (Persero) Bandung.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governace* pada PT Inti (Persero) Bandung.
6. Untuk mengetahui pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governace* pada PT Inti (Persero) Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentunya diharapkan berguna baik untuk peneliti sendiri maupun kepada pihak lain yang akan menggunakan hasil penelitian tersebut. Semua informasi yang diperoleh dari hasil penelitian diharapkan akan berguna bagi:

1.4.1 Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada. Secara teoritis

kegunaan penelitian ini adalah sebagai bukti empiris atas Pengaruh Audit Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* dan diharapkan hasilnya dapat memperkaya khasanah pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Bagi penulis berguna untuk menambah wawasan khususnya mengenai Pengaruh Audit Internal dan Pelaksanaan Pengendalian Intenal terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*, selain itu juga sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama berkaitan dengan judul yang penulis buat.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pelengkap dan masukan serta pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan, khususnya mengenai pengaruh audit internal dan pelaksanaan pengendalian intenal terhadap penerapan *Good Corporate Governance*.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar referensi bagi phak lain khususnya terhadap pengaruh audit internal dan pelaksanaan pengendalian

intenal terhadap penerapan *good corporate governance* pada PT Inti (Pesero) Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada perusahaan PT.Inti (Persero) Bandung pada bagian Audit Internal unuk memperoleh data sesuai dengan obyek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang sudah ditentukan.